

# Sistem e-Kinerja Dinilai Tertutup, Guru di SDN Batalaiworu Muna Mengaku Dirugikan

**MUNA, Sultranet.com** - Sejumlah guru di SD Negeri 6 Batalaiworu, Kabupaten Muna, mengungkapkan dugaan praktik pengelolaan sekolah yang dinilai tidak transparan dan merugikan hak kepegawaian mereka. Persoalan ini mencuat sejak terjadinya pergantian kepala sekolah sekitar tahun 2020 dan hingga kini belum menemukan penyelesaian yang jelas.

Para guru menyebut, kebijakan yang diterapkan kepala sekolah justru memicu keresahan dan konflik internal, mulai dari dugaan penghilangan jam mengajar, hambatan kenaikan pangkat, hingga pengelolaan sistem e-Kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali kepala sekolah tanpa mekanisme pengawasan.

Salah satu guru, Wa Ode Jimria, S.Pd, yang telah mengabdikan sejak tahun 2009, mengaku mengalami perlakuan tidak adil. Ia menyatakan dinonaktifkan dari tugas mengajar tanpa penjelasan resmi serta diduga dihalangi dalam proses pengusulan kenaikan pangkat. Lebih lanjut, posisi yang sebelumnya ia emban justru diberikan kepada guru lain yang diketahui terdaftar di sekolah berbeda dan diduga tidak aktif mengajar di SD Negeri 6 Batalaiworu.

“Yang membuat kami kecewa, keputusan diambil sepihak tanpa musyawarah. Hak kami sebagai guru seolah diabaikan,” ungkapnya. Selasa (13/1/2026)

Keluhan serupa juga disampaikan Asni, S.Pd.I. Ia mengaku daftar kehadirannya tidak ditandatangani oleh kepala sekolah tanpa alasan yang jelas, sehingga berdampak langsung pada administrasi kepegawaiannya. Asni menyebut persoalan tersebut telah ia laporkan kepada Bupati Muna, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang dirasakan.

Selain itu, para guru menyoroti pengelolaan sistem e-Kinerja yang dinilai tidak transparan. Sistem tersebut sepenuhnya dikendalikan dan dikunci oleh kepala sekolah, tanpa akses atau pengawasan dari pihak lain. Kondisi ini dinilai rawan disalahgunakan karena berpengaruh langsung terhadap penilaian kinerja dan

hak-hak kepegawaian guru.

Ketegangan kembali memuncak ketika Kepala SD Negeri 6 Batalaiworu, diduga secara tiba-tiba menghapus jam mengajar sejumlah guru aktif yang memegang kelas. Kebijakan tersebut disebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun rapat resmi, sementara jam mengajar justru dialihkan kepada guru yang terdaftar di sekolah lain dan diduga jarang hadir mengajar.

Para guru berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, klarifikasi, serta penertiban manajemen sekolah. Mereka menegaskan, langkah tersebut penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang adil, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang kami minta hanya keadilan dan keterbukaan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi pendidik,” ujar salah seorang guru.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SD Negeri 6 Batalaiworu, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis media ini.

Pewarta: Borju

---

## **Pemkab Bombana Bentuk Tim Penertiban Tambang Ilegal, Prioritaskan Sosialisasi kepada Masyarakat**

**Bombana, sultranet.com** — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam menata aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan dengan menggelar rapat Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah penertiban yang tetap mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi

masyarakat di daerah tersebut, di Ruang Tinaorima Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (13/1/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-19 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat koordinasi dalam pengendalian aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, pejabat eselon II dan III terkait, Kepala Kantor Pertanahan, serta sejumlah awak media.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dr. Sunandar, MM.Kes bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Budiman, MM serta anggota tim lainnya. Rapat berlangsung mulai pukul 13.30 WITA hingga pukul 15.30 WITA.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana memaparkan latar belakang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penertiban pertambangan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, keamanan daerah, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.

“Pembentukan tim ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan bahwa aspek sosial dan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan oleh unsur Forkopimda sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bombana menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendampingi dan mengawal pelaksanaan tugas tim apabila diperlukan dalam proses penertiban di lapangan.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pertambangan agar penataan sektor ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Kami siap mendampingi tim dalam proses penertiban apabila diperlukan. Selain itu, kami juga mengusulkan agar disusun Peraturan Daerah terkait pertambangan serta dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bombana menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan secara legal.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memperjuangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Kebijakan yang diambil harus memberi ruang kepada masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara legal,” katanya.

Dari unsur Kejaksaan, disampaikan pula pandangan mengenai pentingnya penertiban yang menyentuh aspek perizinan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kejaksaan juga mendorong agar hasil tambang yang diperoleh masyarakat dapat dijual kepada perusahaan yang memiliki izin resmi, sehingga rantai distribusi mineral dapat diawasi secara lebih baik.

Sementara itu, perwakilan dari Kodim menyampaikan agar pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam tahap awal penanganan persoalan pertambangan ilegal.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif sebelum langkah penertiban dilakukan di lapangan.

“Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Penertiban tidak sebaiknya dilakukan secara

langsung sebelum tahapan tersebut berjalan optimal,” ujarnya.

Menutup rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyampaikan kesimpulan bahwa langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak dan media sosial, agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanggil para kepala desa di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan untuk diberikan arahan dan pemahaman terkait kebijakan yang sedang disiapkan.

“Hasil dari sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.

---

## **Wakil Bupati Bombana Pimpin Rapat Percepatan Pembebasan Lahan Kawasan Industri PT Sultra Industrial Park**

**Bombana, sultranet.com** — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mempercepat proses pembangunan kawasan industri dengan memfasilitasi pembebasan lahan bagi investasi PT Sultra Industrial Park. Langkah ini dibahas

dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S.Pd., M.Si. bersama sejumlah unsur pimpinan daerah, guna memastikan proses pembangunan kawasan industri berjalan sesuai ketentuan serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana pada Selasa, 13 Januari 2026.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Bombana, para asisten Sekda, kepala organisasi perangkat daerah terkait beserta jajaran, serta perwakilan dari PT Kawasan Industri Sultra.

Pertemuan ini secara khusus membahas permohonan fasilitasi pembebasan lahan yang diajukan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan industri PT Sultra Industrial Park. Pemerintah daerah memandang bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan proses investasi berjalan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam rapat itu, berbagai aspek teknis dan administratif turut dibahas, termasuk mekanisme pembiayaan pembebasan lahan yang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar proses pembebasan lahan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan kondusif.

Selain membahas persoalan pembebasan lahan, rapat tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pengembangan kawasan industri yang direncanakan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bombana.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S.Pd., M.Si. dalam arahannya menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri di daerah tersebut bukanlah program yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah dirumuskan secara resmi oleh pemerintah daerah.

“Pengembangan kawasan industri ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan pada tahap awal difokuskan di Kecamatan Rarowatu Utara,” kata Ahmad Yani.

Ia menjelaskan bahwa kawasan industri yang direncanakan di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan adanya kawasan industri, berbagai aktivitas ekonomi baru diyakini akan tumbuh, mulai dari sektor industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa pendukung lainnya.

Menurut Ahmad Yani, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi komunikasi dan kesepahaman antara perusahaan dan masyarakat, khususnya terkait proses pembebasan lahan.

“Pemerintah daerah memfasilitasi kesepahaman antara masyarakat dan perusahaan agar proses pembebasan lahan berjalan baik dan kawasan industri dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap tahapan pembangunan harus memperhatikan aspek sosial serta kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, proses pembebasan lahan diharapkan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, pembangunan kawasan industri juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Bombana. Dengan bertambahnya investasi di daerah, peluang kerja bagi tenaga lokal diperkirakan akan meningkat seiring berkembangnya berbagai kegiatan industri.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kehadiran kawasan industri akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatkan investasi, kawasan industri juga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah sekitar.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat bekerja sama secara konstruktif agar proses pembebasan lahan dan pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bombana.

tag:

frasa kunci:

topik:

deskripsi meta:

---

# **Bupati Bombana Lakukan Tanam Perdana Program Cetak Sawah Rakyat untuk Dukung Swasembada Pangan**

**Bombana, sultranet.com** — Pemerintah Kabupaten Bombana memulai tanam perdana padi dalam Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperluas lahan pertanian produktif di wilayah Bombana. Tanam perdana tersebut dilaksanakan di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, pada Senin, 12 Januari 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, S.P., Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Kapolres Bombana, mantan Ketua DPRD Bombana Andhy Adrian, para camat dan kepala desa di wilayah setempat, serta perwakilan dari pihak pelaksana kegiatan, CV Maraja Buana.

Tanam perdana tersebut menjadi penanda dimulainya pemanfaatan lahan sawah baru yang telah selesai dicetak melalui program pemerintah. Program Cetak Sawah Rakyat sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperluas area pertanian sekaligus meningkatkan produksi beras nasional.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa

pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program tersebut secara serius karena menjadi bagian penting dari agenda pembangunan sektor pertanian nasional.

Ia menyebutkan bahwa dari target cetak sawah seluas 750 hektare yang direncanakan di Kabupaten Bombana, sebanyak 269 hektare telah berhasil diselesaikan dan kini siap dimanfaatkan oleh para petani. Lahan yang telah selesai dicetak itu kemudian langsung dimanfaatkan melalui kegiatan tanam perdana padi.

“Yang 269 hektare ini sudah selesai dan hari ini kita lakukan tanam perdana. Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian sebagian lahan cetak sawah tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Ia berharap lahan yang telah dicetak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah.

Burhanuddin juga menjelaskan bahwa sisa target cetak sawah akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bombana bahkan berencana mengusulkan perluasan cetak sawah baru hingga mencapai 2.000 hektare pada tahun 2026.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengusulan tersebut akan tetap memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk kesiapan teknis, kondisi lahan, serta legalitas kepemilikan lahan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain memperluas lahan pertanian, pemerintah daerah juga memiliki rencana untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang dihasilkan di Bombana. Salah satu langkah yang didorong adalah pengolahan gabah hasil panen di dalam daerah sehingga perputaran ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

“Saya ingin ke depan gabah hasil pertanian Bombana dapat diolah di Kabupaten Bombana, sehingga nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah,” ujar Burhanuddin.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah membantu keberhasilan program di lapangan.

Sebagai simbol dukungan terhadap program swasembada pangan, Bupati Bombana bersama Ketua DPRD Kabupaten Bombana turut turun langsung ke area persawahan untuk melakukan penanaman padi secara simbolis bersama para petani.

Kehadiran para pimpinan daerah di lokasi kegiatan sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati Bombana menegaskan bahwa seluruh bantuan yang diberikan melalui Program Cetak Sawah Rakyat tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada bayar-membayar. Semua bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten harus diterima masyarakat secara gratis,” tegas Burhanuddin.

Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila menemukan adanya praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan program.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program cetak sawah tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan semakin luasnya lahan pertanian yang produktif, diharapkan Bombana mampu meningkatkan kontribusinya dalam mendukung ketersediaan pangan nasional.

---

# Bupati Bombana Resmikan RTH Taman Merdeka Boepinang, Ruang Publik Baru untuk Warga Poleang

**Bombana, sultranet.com** — Pemerintah Kabupaten Bombana meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Merdeka Boepinang sebagai ruang publik baru yang diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus mempercantik wajah kawasan Poleang. Peresmian taman tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang menegaskan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang interaksi yang nyaman bagi warga. Peresmian RTH Taman Merdeka Boepinang dilaksanakan di Kecamatan Poleang pada Minggu, 11 Januari 2026.

Bupati Bombana hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Acara peresmian turut dihadiri para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah, Camat Poleang, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Poleang, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan warga Boepinang dan sekitarnya.

Peresmian taman tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kawasan perkotaan di wilayah Poleang. Selain memperbaiki lingkungan, keberadaan ruang terbuka hijau juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekologis bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan RTH Taman Merdeka Boepinang merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah sejak awal masa kepemimpinannya.

“Sejak saya dilantik kurang lebih sepuluh bulan yang lalu, saya ingin mempertegas bahwa komitmen kami adalah menjadi pelayan masyarakat. Apa yang kita bangun hari ini adalah agar masyarakat benar-benar merasakan hasil dari kerja pemerintah,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, pembangunan ruang publik seperti taman kota merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Taman tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang bagi warga untuk berinteraksi, berolahraga, dan melakukan berbagai kegiatan sosial.

Bupati Burhanuddin juga menegaskan bahwa wilayah Boepinang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan dan penataan kawasan agar Boepinang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Saya punya keyakinan Boepinang ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana. Ini baru pemanasan. Ke depan kita akan terus membenahi dan membangun Boepinang menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan perkotaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan ruang-ruang publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah. Ia meminta masyarakat agar tidak segan mengingatkan pemerintah jika terdapat janji pembangunan yang belum terlaksana.

“Kalau ada hal-hal yang pernah saya janjikan atau yang saudara-saudara butuhkan, tolong ingatkan kami. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” katanya.

Selain membahas pembangunan, Bupati Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia menekankan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah serta bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurutnya, media sosial harus dimanfaatkan secara positif dan tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik atau perpecahan di tengah masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap RTH Taman Merdeka Boepinang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Ia menginginkan taman tersebut

menjadi ruang publik yang hidup, di mana masyarakat dapat berkumpul, berolahraga, serta menggelar berbagai kegiatan sosial dan budaya.

“Saya ingin keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan, tetapi dari seberapa bahagia masyarakat Kabupaten Bombana. Mari kita jaga dan manfaatkan taman ini sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Dengan diresmikannya RTH Taman Merdeka Boepinang, pemerintah daerah berharap kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ruang publik yang tertata, hijau, dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran taman ini juga diharapkan menjadi awal dari perubahan wajah Boepinang menuju kawasan yang lebih modern serta menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Poleang.

---

## **Bupati Bombana Buka Turnamen Sepak Bola Mini HIPMAB Cup VIII, Dorong Sportivitas dan Pembinaan Atlet Daerah**

**Bombana, sultranet.com** — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Mini HIPMAB Cup ke-VIII yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bombana (HIPMAB) Kolaka. Turnamen ini menjadi ajang olahraga tahunan yang tidak hanya mempertemukan para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi masyarakat serta sarana pembinaan generasi muda Bombana melalui kegiatan olahraga. Pembukaan turnamen berlangsung di Lapangan Angkasa Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, pada Minggu, 11 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Acara pembukaan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bombana, para kepala organisasi

perangkat daerah, Camat Poleang Barat, Kepala Desa Rakadua, pengurus HIPMAB Kolaka, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta masyarakat setempat yang memadati lapangan pertandingan.

Turnamen HIPMAB Cup yang telah memasuki penyelenggaraan kedelapan ini dikenal sebagai salah satu agenda olahraga yang konsisten digelar oleh mahasiswa Bombana yang sedang menempuh pendidikan di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga, sekaligus mempererat hubungan sosial antara mahasiswa dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan apresiasi atas konsistensi HIPMAB Kolaka dalam menyelenggarakan turnamen tersebut setiap tahun. Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya dalam pembinaan karakter generasi muda serta pengembangan potensi olahraga.

“Seperti yang kita lihat bahwa memang kegiatan HIPMAB ini saya memberikan jempol karena rutin dan konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. Tentu ini saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini kecil maupun besar kegiatannya saya pastikan ini akan berdampak bagi Kabupaten Bombana,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, sportif, dan memiliki semangat kompetisi yang sehat. Oleh karena itu, kegiatan olahraga seperti HIPMAB Cup perlu terus didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda di daerah.

Bupati Burhanuddin juga mengingatkan kepada seluruh peserta turnamen agar menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menekankan bahwa kemenangan memang menjadi tujuan dalam kompetisi, tetapi sikap sportif dan permainan yang baik merupakan nilai yang lebih penting.

“Menang memang satu tujuan, tetapi bermain suportif, bermain baik adalah suatu kehormatan. Berikan yang terbaik kepada masyarakat, lalu kemudian menang dan berprestasi,” tegasnya.

Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, turnamen ini juga dinilai dapat berfungsi sebagai sarana pemantauan dan penjaringan atlet potensial yang dapat

dipersiapkan untuk berbagai kejuaraan olahraga tingkat daerah maupun provinsi.

Bupati Burhanuddin menyampaikan harapannya agar ajang seperti HIPMAB Cup dapat menjadi bagian dari proses pembinaan atlet daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara tahun 2026.

“Saya berharap dalam kegiatan olahraga apa pun yang kita lakukan di Bombana ini, Ketua KONI bisa menilai. Saya berharap atlet-atlet yang akan berlaga di Porprov 2026 benar-benar putra-putri Bombana. Mudah-mudahan Bombana juga bisa menjadi tuan rumah Porprov tahun depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan pesan khusus kepada para mahasiswa Bombana yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, khususnya di Kabupaten Kolaka. Ia mengingatkan agar mereka senantiasa menjaga nama baik daerah serta menunjukkan prestasi di mana pun berada.

“Kalian adalah duta-duta Bombana. Apa yang kalian lakukan di Kolaka adalah cerminan masyarakat Bombana. Jika kalian berprestasi di kampung orang, itu akan menjadi kebanggaan bagi Bombana,” katanya.

Lebih jauh, Bupati Burhanuddin menilai kegiatan olahraga seperti HIPMAB Cup tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia olahraga, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran turnamen yang melibatkan banyak peserta dan penonton dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berjualan di sekitar lokasi kegiatan.

“Melalui kegiatan ini, UMKM dan masyarakat bisa ikut berjualan sehingga ada efek peningkatan ekonomi masyarakat,” tutup Burhanuddin.

Turnamen Sepak Bola Mini HIPMAB Cup VIII diharapkan dapat berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum bagi lahirnya atlet-atlet muda berbakat dari Kabupaten Bombana yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun provinsi.

---

# H. Pajawa Tarika Resmi Pimpin Satpol PP Bombana, Gantikan Rusman

**Bombana, sultranet.com** - Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana resmi berganti setelah dilaksanakannya serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satpol PP dari Rusman, S.Pd., M.Si kepada H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Pergantian tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bombana. Prosesi sertijab berlangsung di Aula Satya Praja Lantai 2 Markas Komando Satpol PP Kabupaten Bombana, Rabu (11/02/2026).

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri hampir seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana serta jajaran pejabat struktural di lingkungan organisasi tersebut. Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib, mencerminkan semangat profesionalisme serta kebersamaan di antara para aparatur penegak peraturan daerah itu.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Selanjutnya dilaksanakan prosesi simbolis penyerahan bendera Satuan Polisi Pamong Praja serta tongkat komando yang menandai peralihan tanggung jawab kepemimpinan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru.

Dalam kesempatan tersebut, Rusman menyampaikan pesan dan kesan di akhir masa jabatannya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan selama dirinya memimpin satuan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. Kebersamaan yang kita bangun menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban daerah,” ujar Rusman dalam sambutannya.

Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa organisasi Satpol PP Bombana

semakin solid serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan peraturan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bombana yang baru, H. Pajawa Tarika, dalam sambutan perdananya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah dirintis sebelumnya. Ia juga bertekad meningkatkan kinerja organisasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya berkomitmen melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kinerja Satpol PP Kabupaten Bombana, terutama dalam penegakan peraturan daerah dan peningkatan profesionalisme anggota,” kata Pajawa Tarika.

Ia menambahkan bahwa peran Satpol PP sangat strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat serta sinergi yang solid di antara seluruh anggota untuk memastikan tugas-tugas tersebut dapat dijalankan secara optimal.

“Kunci keberhasilan kita adalah kerja sama dan sinergi yang solid antaranggota. Dengan kebersamaan, saya yakin Satpol PP Bombana dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik,” lanjutnya.

Pajawa Tarika juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur Satpol PP sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang profesional. Menurutnya, anggota Satpol PP harus mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan sertijab kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagai bentuk pengesahan administrasi atas pergantian kepemimpinan tersebut. Prosesi ini diikuti dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara pejabat lama dan pejabat baru bersama seluruh anggota Satpol PP.

Suasana haru juga mewarnai acara tersebut ketika jajaran pejabat eselon serta para staf aparatur sipil negara di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bombana menyerahkan cenderamata kepada Rusman sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin organisasi tersebut.

Beberapa anggota Satpol PP tampak menahan haru saat prosesi penyerahan

cenderamata berlangsung. Momen tersebut menjadi simbol kuatnya ikatan kebersamaan di antara para aparatur yang selama ini bekerja bersama menjaga ketertiban daerah.

Secara keseluruhan, prosesi serah terima jabatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang hangat namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Satpol PP Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru di bawah H. Pajawa Tarika, Satpol PP Kabupaten Bombana diharapkan semakin efektif dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bombana.

---

# **Bupati Bombana Resmikan Angkutan Jalan Perintis Rumbia-Tontonunu dan Kasipute-Puuwatu**

**Bombana, sultranet.com** — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan layanan angkutan jalan perintis untuk memperkuat konektivitas transportasi masyarakat, yakni rute Rumbia-Tontonunu pulang pergi serta rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute-Terminal Tipe A Puuwatu Kendari pulang pergi. Program ini dihadirkan untuk menyediakan transportasi publik yang lebih terjangkau sekaligus menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani transportasi komersial secara optimal. Peluncuran layanan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam acara yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Acara launching tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(Forkopimda) Bombana, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, perwakilan Kementerian Perhubungan, Direktur DAMRI Sulawesi Tenggara yang diwakili, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara, para camat yang wilayahnya dilintasi trayek, serta sejumlah undangan lainnya.

Peluncuran layanan angkutan perintis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses transportasi publik bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan transportasi komersial secara memadai. Program ini juga diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa kebutuhan transportasi publik yang terjangkau sangat penting bagi masyarakat Bombana yang tersebar di berbagai wilayah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana saat ini memiliki 22 kecamatan, 121 desa, dan 22 kelurahan yang memerlukan dukungan sistem transportasi publik yang mampu menjangkau berbagai wilayah tersebut.

“Launching angkutan jalan perintis ini merupakan upaya pemerintah daerah menghadirkan sarana transportasi yang terjangkau dan bermanfaat bagi mobilitas masyarakat, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberadaan layanan angkutan perintis akan memberikan alternatif transportasi yang lebih aman dan ekonomis bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan antarwilayah.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Perum DAMRI yang telah memberikan dukungan dalam penyediaan layanan angkutan perintis di Kabupaten Bombana. Dukungan tersebut memungkinkan tersedianya subsidi dari pemerintah sehingga tarif transportasi dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana bersama Perum DAMRI untuk memastikan operasional layanan berjalan

secara optimal. Ia menekankan pentingnya pengaturan titik singgah kendaraan serta jadwal perjalanan agar layanan transportasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap Dinas Perhubungan bersama DAMRI dapat mengatur titik-titik singgah kendaraan serta memastikan layanan ini berjalan rutin sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan layanan angkutan jalan perintis tersebut. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk camat dan kepala desa, untuk turut menyampaikan informasi kepada masyarakat agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam laporan panitia kegiatan disebutkan bahwa penyelenggaraan angkutan jalan perintis ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya daerah yang belum dilayani transportasi komersial secara rutin. Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat penggunaan kendaraan pribadi dalam perjalanan jarak jauh.

Untuk operasional awal, tersedia dua unit bus yang masing-masing melayani dua trayek utama. Rute Rumbia-Tontonunu diberangkatkan dari Pasar Sentral Tadoha Mapaccing pada pukul 09.00 WITA setiap hari. Sementara itu, rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute menuju Terminal Tipe A Puuwatu di Kota Kendari juga berangkat pada pukul 09.00 WITA, dengan jadwal perjalanan kembali yang disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.

Pemerintah menetapkan tarif angkutan yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Untuk rute Rumbia-Tontonunu, tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp15.000 per penumpang. Sedangkan untuk rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute menuju Terminal Tipe A Puuwatu Kendari dikenakan tarif sebesar Rp35.000.

Dengan tarif yang disubsidi oleh pemerintah, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan ekonomis.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kehadiran angkutan jalan perintis ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan konektivitas wilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai kecamatan.

Selain itu, layanan transportasi publik yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat hubungan antarwilayah di Kabupaten Bombana maupun dengan daerah sekitarnya.

---

# **Bupati Bombana Buka Manasik Haji 1447 H, 130 Calon Jamaah Ikuti Pembekalan Ibadah**

**Bombana, sultranet.com** - Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Manasik Haji tingkat Kabupaten Bombana sebagai bagian dari persiapan keberangkatan jamaah calon haji musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan ini diikuti ratusan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dan menjadi momentum penting untuk memberikan pembekalan menyeluruh terkait pelaksanaan ibadah haji. Acara pembukaan berlangsung di Aula Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHUT) Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan bimbingan manasik haji tersebut mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan”. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap kelompok jamaah yang membutuhkan pelayanan lebih, agar seluruh proses ibadah dapat dijalankan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Pembukaan kegiatan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, jajaran Dinas Kesehatan, serta para pembimbing ibadah yang akan mendampingi jamaah selama proses manasik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa manasik haji merupakan tahapan penting bagi calon jamaah sebelum berangkat ke Tanah

Suci. Melalui kegiatan tersebut, para jamaah diharapkan dapat memahami secara menyeluruh tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi jamaah yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh jamaah memperoleh pelayanan dan pembinaan yang memadai.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh jamaah, khususnya yang termasuk kelompok lansia, disabilitas, dan perempuan, mendapatkan pelayanan terbaik serta bimbingan yang cukup agar dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga mengingatkan para calon jamaah agar memanfaatkan kesempatan manasik haji sebaik mungkin. Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap sesi pembekalan dengan serius agar memiliki kesiapan yang matang, baik secara spiritual, fisik, maupun mental sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana H. Surahman dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana tahun ini sebanyak 130 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 51 jamaah laki-laki dan 79 jamaah perempuan.

Menurut Surahman, pelaksanaan manasik haji bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para jamaah mengenai rangkaian ibadah haji. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, hingga berbagai situasi yang mungkin dihadapi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara H. Lalan Jaya juga memberikan sambutan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan manasik haji terintegrasi memiliki peran penting dalam mempersiapkan jamaah secara menyeluruh.

“Manasik haji terintegrasi bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, baik rukun, wajib, maupun sunnahnya,” jelas Lalan Jaya.

Ia menambahkan bahwa selain pembekalan materi ibadah, kegiatan manasik juga bertujuan membangun kesiapan fisik dan mental para jamaah. Hal ini penting mengingat pelaksanaan ibadah haji memerlukan ketahanan fisik serta kesiapan mental yang baik, terutama bagi jamaah yang berusia lanjut.

Dalam kegiatan manasik tersebut, para jamaah akan mendapatkan berbagai materi pembelajaran, termasuk simulasi pelaksanaan ibadah haji, pemahaman tentang tata cara perjalanan, serta pembinaan kesehatan bagi calon jamaah.

Melalui pembekalan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana dapat melaksanakan ibadah dengan tertib, mandiri, serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah juga berharap para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Kegiatan pembukaan manasik haji berlangsung dengan tertib dan lancar, sekaligus menandai dimulainya rangkaian bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Deskripsi meta:

---

**Advokat Sukdar, SH., MH, Kecam  
Keras Penembakan Warga  
Bombana oleh Oknum Brimob,**

# Minta Pengusutan Menyeluruh

**Bombana, Sultranet.com** - Insiden penembakan yang menimpa seorang warga sipil di lokasi penambangan batu cinnabar di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menuai kecaman keras dari praktisi hukum nasional asal Bombana, Advokat Sukdar, S.H., M.H. Jumat (9/1/2026)

Ia menilai tindakan oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diusut secara menyeluruh.

Peristiwa penembakan terjadi pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.00 WITA. Seorang warga bernama Jono (53), warga Desa Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara, dilaporkan tertembak di bagian kaki kanan. Korban saat ini masih menjalani perawatan medis intensif di RSUD Tanduale Bombana.

Kejadian tersebut berlangsung di area tambang batu cinnabar yang selama ini menjadi lokasi aktivitas masyarakat. Insiden ini sempat memicu ketegangan serius antara warga dan sejumlah oknum aparat bersenjata yang berada di lokasi.

Situasi di lapangan dikabarkan mencekam, dengan warga mempertanyakan kehadiran aparat di area tambang yang berujung pada aksi penembakan terhadap warga sipil.

Menanggapi peristiwa itu, Advokat Sukdar yang juga merupakan putra asli Desa Wambarema menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahannya. Dihubungi melalui sambungan telepon dari Jakarta, ia menegaskan bahwa secara moral dan hukum dirinya tidak bisa tinggal diam.

“Saya asli Desa Wambarema, Kabupaten Bombana. Saya memiliki kepedulian moral atas peristiwa yang menimpa warga masyarakat. Saya mengutuk dan mengecam keras tindakan yang anarkis dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Sukdar.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang beredar melalui video dan pemberitaan media, terdapat empat oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Keempatnya disebut-sebut sedang menjalankan tugas

Bawah Kendali Operasi (BKO). Namun, menurut Sukdar, terdapat kejanggalan serius dalam pelaksanaan tugas tersebut.

“Jika benar mereka bertugas BKO, maka mereka wajib berada di bawah kendali Kasatker atau Kepala Operasi di wilayah penugasan. Pertanyaannya, mengapa mereka berada di lokasi tambang tanpa kendali dan pengawasan langsung? Ini sangat janggal dan bertentangan dengan aturan,” ujarnya.

Sukdar menegaskan bahwa penugasan BKO diatur secara ketat dalam Perkapolri Nomor 4 Tahun 2017, Perkapolri Nomor 2 Tahun 2018, serta Perkap Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur mekanisme penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, sistem komando, penilaian kinerja, hingga standar operasional dan keberhasilan dalam Sistem Manajemen Operasi Polri.

“Aturan ini jelas dan tegas. Tidak ada ruang bagi tindakan di luar kendali komando. Olehnya itu, saya mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan BKO ini. Bila perlu, persoalan ini juga bisa disampaikan kepada Komisi Reformasi Polri sebagai bahan evaluasi nasional,” katanya.

Tak hanya menyoroti oknum aparat, Sukdar juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut keterlibatan pihak lain dalam insiden tersebut. Berdasarkan informasi dari keluarga korban, terdapat dua warga sipil berinisial J dan A yang diduga memberikan hasutan serta turut membersamai keempat oknum Brimob di lokasi kejadian.

“Saya meminta Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Bombana untuk mengembangkan penyelidikan dan memproses dua oknum warga sipil tersebut. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukdar menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban. Ia mengaku telah memberikan konsultasi serta konstruksi hukum, sekaligus mengarahkan keluarga korban untuk segera melaporkan peristiwa tersebut secara resmi.

“Alhamdulillah laporan sudah dibuat dan informasi yang saya terima, penanganan kasus ini telah diambil alih oleh Polda Sulawesi Tenggara. Saya berharap seluruh pihak, termasuk Kapolres Bombana, pemerintah daerah, dan masyarakat, dapat

bersama-sama menjaga situasi keamanan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Sultra," tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, insiden penembakan di lokasi penambangan batu cinnabar Desa Wambarema diduga terjadi saat empat oknum anggota Brimob mendatangi area tambang dengan dalih melakukan penyisiran. Namun kehadiran mereka justru berujung pada aksi penembakan terhadap warga sipil, yang kini menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. (IS).